



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Nomor : B/ 98 / II / 2018
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu eksamplar
Perihal : Usulan revisi anggaran

Banda Aceh, 02 Februari 2018

Kepada
Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN
BANDA ACEH

di

Banda Aceh

1. Rujukan :
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 10/PMK.02/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
 - e. surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh nomor : s-123/WPB.01/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang penyesuaian administratif revisi anggaran tahun 2016 dan usul revisi anggaran tahun 2017 ;
 - f. DIPA Petikan Ditreskrimsus Polda Aceh Tahun Anggaran 2018 Nomor : DIPA-060.01.2.679312/2018 tanggal 05 Desember 2017 kode Digital Stamp 1865-6055-3833-0200.
2. Alasan / pertimbangan perlunya revisi anggaran :
 - a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang tersedia;
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja K/L dan meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran terbatas.
3. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kategori revisi perubahan rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
 - b. Jenis revisi dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional.
4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data pendukung berupa :
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. SPTJM;
 - c. ADK RKAKL DIPA REVISI
 - d. Copy DIPA petikan terakhir;
 - e. POK RKAKL setelah revisi.
5. Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Irwasda Polda Aceh
3. Karo Rena Polda Aceh
4. Kabid Keu Polda Aceh.





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : 01/II/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Drs. ARMENSYAH THAY
PANGKAT / NRP : KOMISARIS BESAR POLISI / 59081159
JABATAN : KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal – hal sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran sanggup menyelesaikan Keluaran (*output*) yang telah direncanakan.
2. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran usulan Revisi Anggaran yang diajukan.
3. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
4. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satker dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.
5. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.
6. Revisi Anggaran yang dilaksanakan tidak mengurangi volume Keluaran (*output*) yang telah direncanakan.
7. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.
8. Dalam hal revisi anggaran mengakibatkan permasalahan hukum, menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.



Banda Aceh, 02 Februari 2018
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ERWIN ZADMA, SIK.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68020421



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor: 01/W/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Drs. ARMENSYAH THAY

PANGKAT / NRP : KOMISARIS BESAR POLISI / 59081159

JABATAN : KUASA PENGUNA ANGGARAN

Gerakan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal – hal sebagai berikut :

1. Kuasa Penguna Anggaran sanggup menyelesaikan kewajiban (output) yang telah direncanakan.
2. Kuasa Penguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran usulan Revisi Anggaran yang diajukan.
3. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
4. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disamping oleh Sastker dan siap untuk disubit sewaktu-waktu.
5. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.
6. Revisi Anggaran yang dilaksanakan tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan.
7. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menanggung kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.
8. Dalam hal revisi anggaran mengakibatkan permasalahan hukum, menjadi tanggung jawab Kuasa Penguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Daerah Aceh, 02 Februari 2018
KUASA PENGUNA ANGGARAN



KOMISARIS BESAR POLISI NRP 59080451
ERWIN LADMA SIK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.679312/2018



DS:1865-6055-3833-0200

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (060) | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| 2. Unit Organisasi | : | (01) | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| 3. Provinsi | : | (06) | ACEH |
| 4. Kode/Nama Satker | : | (679312) | DITRESKRIMSUS POLDA ACEH |
| Sebesar | : | Rp. 9.955.731.000 | (SEMBILAN MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH SATU RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.01 KEPOLISIAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	9.955.731.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN BANDA ACEH | (001) Rp. | 9.955.731.000 |
|--------------------|-----------|---------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 060.01.2.679312/2018



DS:1865-6055-3833-0200

Satker : (679312) DITRESKRIMSUS POLDA ACEH

01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	Rp.	7.578.000
01.5051	Penyusunan Kebijakan Polri	Rp.	5.014.000
01.5054	Manajemen Anggaran	Rp.	2.564.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	Rp.	319.180.000
02.5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	Rp.	319.180.000
11	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Rp.	9.628.973.000
11.3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Rp.	5.880.106.000
11.3145	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	Rp.	343.449.000
11.3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Rp.	3.173.675.000
11.5082	Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Rp.	201.743.000
11.5086	Pengawasan Penyidikan	Rp.	30.000.000

